



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

# bangga  
melayani  
bangsa

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM



DUKCAPIL  
GO  
DIGITAL



Jalan Ir. Sutami Kec. Sekupang, Batam



<https://disdukcapil.batam.go.id>

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b> .....	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	35
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>37</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	38
3.3 Program dan Kegiatan .....	39
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>54</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.0	Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan T.A. 2021 .....	10
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam .....	21
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam .....	28
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Batam .....	36
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam .....	40
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2023 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

1. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;

3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini dijadikan acuan untuk bahan penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025;
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942).

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **➤ Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RENJA PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Batam Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

➤ **Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Daftar Tabel

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kementerian, Renja Provinsi dan Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD 2021, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PERANGKAT DAERAH.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing PERANGKAT DAERAH, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan pembahasan hal-hal antara lain :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (**Milenium Development Goals**).
4. Peluang dan Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Formulasi isu-isu penting/strategis berupa rekomendasi dan pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan dan catatan penting.
4. Lampiran tabel.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun langsung dari

Kelurahan/Kecamatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi berdasarkan pelaksanaan pelayanan kependudukan di Kelurahan/Kecamatan oleh masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan pembahasan hal-hal antara lain :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi antara antara lain :

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dikaitkan dengan pencapaian renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Base Kependudukan belum optimal dilaksanakan.
2. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan belum maksimal, sehingga belum semua penduduk Kota Batam mempunyai dokumen kependudukan.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim, sehingga belum bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, antara lain :

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang belum representatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan pengelolaan arsip belum sebagaimana mestinya.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
3. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal :
  - a. Kompetensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  - b. Teknis penyusunan perencanaan.
4. Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi.
5. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

6. Belum sempurnanya program sistem informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
7. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara Kelurahan-Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 yang mencakup 2 Program dan hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Nopember 2021, serta realisasi keuangan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.0 Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan T.A. 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI s.d DESEMBER</b>	<b>SISA</b>	<b>%</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.891.251.150	15.321.009.582	1.570.241.568	90,70
2.	Pendaftaran Penduduk	61.479.363	61.479.363	0	100

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dengan anggaran sebesar Rp. 16.891.251.150,- terealisasi sebesar Rp. 15.321.009.582,- (90,70 %) sisa anggaran sebesar Rp. 1.570.241.568,-. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini s.d Desember 100 % kategori capaian kinerja baik.

## **II. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Penataan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan dengan anggaran sebesar Rp. 61.479.363,- terealisasi sebesar Rp. 61.479.363,- (100 %) Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100 % kategori capaian kinerja baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tersebut, menunjukkan bahwa semua

program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Tahun 2021 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.1.





2	1	1	2.	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase</b> <b>Administrasi</b> <b>Keuangan</b> <b>Perangkat Daerah</b> <b>yang terpenuhi</b>	100 %					100 %	100 %	100 %
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						76 orang/ bulan	76 orang/ bulan	76 orang/ Bulan
				<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						17 Dokume n	13 Dokumen	13 Dokumen
2	1	1	2.	<b>Kegiatan</b> Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase</b> <b>ketersediaan</b> <b>administrasi umum</b> <b>Perangkat Daerah</b>	100 %					100 %	100 %	100 %
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	0 Paket	0 Paket

				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						6 Paket	6 Paket	6 Paket
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	0 Paket	0 Paket
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	1 Paket	1 Paket
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82 Laporan	37 Laporan	37 Laporan
2	1	1	2.	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah</b>	100 %					100 %	100 %	100 %

				<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	2 Unit
2	1	1	2.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %					100 %	100 %	100 %
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
				<b>Sub Kegiatan</b> Terlaksana nya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan

2	1	1	2.	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	100 %					100 %	100 %	100 %
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 Unit	1 Unit	1 Unit
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						6 Unit	6 Unit	6 Unit

				<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						124 Unit	40 Unit	40 Unit
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	2 Unit	2 Unit
2	1	4	2	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>
2	1	4	2.01	<b>Kegiatan</b> Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	100 %					100%	100%	100%

				<b>Sub Kegiatan</b> Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						4 Dokume n	2 Dokumen	2 Dokumen
2	1	4	2.	<b>Kegiatan</b> Penyelengga raan Pengelolaan Infor masi Administrasi Kependudukan	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan</b>	100 %					100 %	100 %	100%
				<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu Persentase penerbitan Akta Kelahiran, Persentase penerbitan Kartu Keluarga, dan Persentase penerbitan KTP elektronik.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 terlihat dalam table 2.2. berikut :

**Tabel 2.2****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				80%	87%	94%	97,24%	-	100%	100%	
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil				98%	98,5%	99%	89,78%	-	100%	100%	
3	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan				34%	48%	100%	32,56%	-	50%	100%	



Berdasarkan table 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan rasio perhitungan sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Catatan Sipil dihitung dari jumlah kepemilikan Akte Kelahiran dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$$

Di Semester 1 2021 cakupan penerbitan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun mencapai realisasi 89,78 % dari target Renstra sebesar 97,5 %, dengan demikian capaian kinerja mencapai 92,08 %, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan akte kelahiran di tahun 2022 adalah 100 % dan tahun 2023 mencapai 100 % dari target renstra tahun 2022 sebesar 98 % dan target renstra tahun 2023 sebesar 98,5 %.

2. Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dihitung dari jumlah kepemilikan KTP dan KK dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$(\text{Rasio kepemilikan KTP} + \text{Rasio kepemilikan KK}) \div 2$$

Sementara Rasio Kepemilikan KTP dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$$

dan Rasio Kepemilikan KK dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester 1 2021 persentase penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK) mencapai 97,24 % dari target Renstra sebesar 73 %, dengan demikian capaian kinerja mencapai 133,2 %, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan di tahun 2022 adalah 100% dan tahun 2023 mencapai 100% dari target Renstra tahun 2022 sebesar 87 % dan target Renstra tahun 2022 sebesar 94 %.

Selain 3 (tiga) jenis pelayanan dasar di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait dengan pelayanan memiliki tugas utama yaitu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil. Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan akta-akta catatan sipil tidak lebih dari 5 (lima) hari dengan ketentuan apabila persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi empat poin seperti yang tertulis dalam tabel dibawah ini :

### **Skala Pengukuran ordinal capaian kinerja**

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>RENTANG CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI CAPAIAN KINERJA</b>
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - < 85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55 %	Kurang Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Persentase hasil pencapaian dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi penilaian seperti tabel diatas.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah menjalankan beberapa program kegiatan, berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dari akumulasi beberapa kegiatan, sasaran program secara fisik dapat dicapai 100 %.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat

strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Ketersediaan Blanko KTP-El yang masih fluktuatif.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan Semester 1 2021, menurut data pada Database SIAK Kota Batam capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kota Batam : 1.169.648 Jiwa
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 796.192 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el : 790.935 Jiwa
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el : 5.257 Jiwa
- e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman : 796.192 Jiwa
- f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman : 0 Jiwa

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kota Batam sampai Semester 1 2021 adalah sebesar 99,34 %. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman bisa dicetak;
- b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
- c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang;
- d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).

2. Rendahnya Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0 - 18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0 - 18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d semester 1 2021, sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun : 383.442 Jiwa
- b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0 - 18 tahun : 347.364 Jiwa

3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih ada yang tidak valid.

Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan Negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kota Batam sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis ini yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Dalam satu periode Renstra Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal Perangkat Daerah yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2021- 2026 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17.994.242</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15.836.396</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>12.121.274</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>12.566.685</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	12.092.094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	12.519.505	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	29.180	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	47.180	

-	-	-	-	-	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	<b>100%</b>	<b>261.891</b>
-	-	-	-	-	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	110.385
-	-	-	-	-	<b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Orang	151.506
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.355.164</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>482.746</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.625	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.033	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74 Paket	2.892.931	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	160.113	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.952	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.876	



	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	134.302	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.588	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Laporan	302.354	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	280.136	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>550.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>549.552</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	550.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	<b>549.552</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.554.923</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.538.047</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	176.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	419.523	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	416.400	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan	959.150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan	1.074.397	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	<b>100%</b>	<b>412.880</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	<b>100%</b>	<b>437.474</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.148	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	147.815	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	174.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	71.383	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	71.070	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	152.531	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151,874,000	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>87%</b>	<b>550.000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>87%</b>	<b>1.747.246</b>	
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk, penduduk non permanen dan rentan yang dilayani administrasi kependudukan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>475.000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk, penduduk non permanen dan rentan yang dilayani administrasi kependudukan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>1.692.598</b>	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	125.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	116.616	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	72.000 Dokumen	350.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120.000 Dokumen	1,575.982	

	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>75.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>54.648</b>	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	75.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	<b>54.648</b>	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	<b>98,5%</b>	<b>425.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	<b>98,5%</b>	<b>237.522</b>	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani dokumen catatan sipil sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani dokumen catatan sipil sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>182.874</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	36.000 Dokumen	350.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	36.000 Dokumen	<b>182.874</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pencatatan sipil sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>75.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pencatatan sipil sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>54.648</b>	

	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	75.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	<b>54.648</b>	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>48%</b>	<b>218.363</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>48%</b>	<b>213.149</b>	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>160.000</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>154.901</b>	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	160.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	154.901	
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>58.363</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>58.248</b>	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukanistrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	58.363	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukanistrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	58.248	
	<b>Grand Total</b>			<b>19.187.606</b>	<b>Grand Total</b>			<b>18.034.314</b>	

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel 2.4. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kebutuhan Dana pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami penambahan dari pagu indikatif rancangan RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2022 sehingga anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah juga mengalami penambahan;
- Kebutuhan Dana pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami pengurangan dari pagu indikatif rancangan RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2022 sementara Kebutuhan Dana pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami penambahan berdasarkan kebutuhan pencapaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 untuk Sertifikasi Manajen Mutu Pelayanan Publik ISO 9001:2015. Sehingga secara keseluruhan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami penambahan;
- Kebutuhan Dana pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mengalami pengurangan dari pagu indikatif rancangan RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2022 sehingga anggaran pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga mengalami pengurangan.
- Secara keseluruhan total kebutuhan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengalami perubahan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan gratis untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan

KTP elektronik, KK serta semua pengurusan dokumen kependudukan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, kepastian waktu, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomidir usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima. Pada masa yang akan datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu Pelayanan Publik **ISO 9001:2015**.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Keperentingan Tahun 2023 Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	TIDAK ADA USULAN				

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.



Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

***“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”***

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat
2. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, disepakati sebanyak 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rincian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2022 tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Adm. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>				<b>18,034,314,432</b>				<b>19.230.090.665</b>
	<b>Program Penun jang Urusan Peme rintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>15,836,396,932</b>			<b>100%</b>	<b>17.994.242.957</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	<b>12,566,685,672</b>			100%	<b>12.121.274.630</b>
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji &amp; Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	76 Orang/bul an	12,519,505,672	APBD, Dana Transfer		76 Orang/b ulan	12.092.094.630
	<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	24 Dokumen	47,180,000	APBD		24 Dokumen	29.180.000

			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	<b>261,891,000</b>			100%	0
			<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	2 Paket	110,385,000	APBD		2 Paket	0
			<b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	12 Orang	151,506,000	APBD		12 Orang	0
			<b>Kegiatan</b> Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	<b>482,746,500</b>			100%	<b>3.355.164.685</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	7,033,000	APBD		1 Paket	7.625.000
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	6 Paket	160,113,500	APBD		6 Paket	2.892.931.485
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	7,876,000	APBD		1 Paket	17.952.000

			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	27,588,000	APBD		3 Paket	134.302.200
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	30 Laporan	280,136,000	APBD		30 Laporan	302.354.000
			<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Kota Batam	100%	<b>549,552,400</b>			100%	<b>569.580.000</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	85 Unit	<b>549,552,400</b>	APBD		85 Unit	569.580.000
			<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	100%	<b>1,538,047,360</b>			100%	<b>1.561.413.982</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	1 Laporan	47,250,000	APBD		1 Laporan	176.250.000
			<b>Sub Kegiatan</b> Terlaksananya Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	416,400,000	APBD		4 Laporan	426.013.342
			<b>Sub Kegiatan</b> Peny	Jumlah Laporan Penyediaan	Kota	23	1,074,397,360	APBD		23	959.150.640

			ediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	Laporan				Laporan	
			<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	Kota Batam	100%	<b>437,474,000</b>			100%	<b>386.809.660</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	39,780,000	APBD		1 Unit	42.613.316
			<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	174,750,000	APBD		5 Unit	153.078.002
			<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	92 Unit	71,070,000	APBD		92 Unit	73.925.214
			<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	151,874,000	APBD		2 Unit	117.193.128

			Lainnya								
			<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		<b>87%</b>	<b>1,747,246,000</b>			<b>94%</b>	<b>569.580.000</b>
			<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penduduk, penduduk non permanen dan rentan yang dilayani administrasi kependudukan sesuai ketentuan		100%	<b>1,692,598,000</b>			100%	491.910.000
			<b>Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam	12 Dokumen	116,616,000	APBD		12 Dokumen	129.450.000
			<b>Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	120.000 Dokumen	1,575,982,000	APBD		120.000 Dokumen	362.460.000
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan		100%	<b>54,648,000</b>			100%	<b>77.670.000</b>
			<b>Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	1 Laporan	<b>54,648,000</b>	APBD		1 Laporan	77.670.000
			<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	Kota Batam	<b>98,5%</b>	<b>237,522,500</b>			<b>99%</b>	<b>440.130.000</b>

			<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani dokumen catatan sipil sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	<b>182,874,500</b>			100%	<b>362.460.000</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam	36.000 Dokumen	<b>182,874,500</b>	APBD		36.000 Dokumen	362.460.000
			<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pencatatan sipil sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	<b>54,648,000</b>			100%	<b>77.670.000</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Batam	1 Laporan	<b>54,648,000</b>	APBD		1 Laporan	77.670.000
			<b>Program Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	Kota Batam	<b>48%</b>	<b>213,149,000</b>			<b>100%</b>	<b>226.137.708</b>
			<b>Kegiatan</b> Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	Kota Batam	100%	<b>154,901,000</b>			100%	<b>165.696.000</b>



			<b>Sub Kegiatan</b> Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam	6 Dokumen	154,901,000	APBD		6 Dokumen	165.696.000
			<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	<b>58,248,000</b>			100%	<b>60.441.708</b>
			<b>Sub Kegiatan</b> Sosia lisasi terkait Penge lolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam	1 Laporan	58,248,000	APBD		1 Laporan	60.441.708

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan Dinas setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026, pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Terdapat berbagai macam sumber pedanaan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa Sumber pendanaan daerah diataranya adalah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dll. Rincian Rencanan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam pada Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2														
2	12									18,034,314,432				
2	12	1								15,836,396,932				
2	12	1	2.02							12,566,685,672				
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	76 Orang/bulan	100 %	12,519,505,672	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	24 Dokumen	100 %	47,180,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	12	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>261,891,000</b>				
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Paket	100 %	110,385,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Orang	100 %	151,506,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>482,746,500</b>				
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	7,033,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	6 Paket	100 %	160,113,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	7,876,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3 Paket	100 %	27,588,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	30 Laporan	100 %	280,136,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>549,552,400</b>			
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	85 Unit	100 %	549,552,400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,538,047,360</b>			
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	47,250,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	416,400,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	23 Laporan	100 %	1,074,397,360	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>437,474,000</b>			
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	39,780,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5 Unit	100 %	174,750,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	92 Unit	100 %	71,070,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Unit	100 %	151,874,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	12	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>					<b>1,747,246,000</b>					
2	12	2	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					<b>1,692,598,000</b>					
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	12 Dokumen	87 %	116,616,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	120000 Dokumen	87 %	1,575,982,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	2	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>					<b>54,648,000</b>					
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	1 Laporan	87 %	54,648,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	3			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>					<b>237,522,500</b>					
2	12	3	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					<b>182,874,500</b>					
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil		100 %	36000 Dokumen	98.5 %	182,874,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	12	3	2.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>					<b>54,648,000</b>					
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil		100 %	1 Laporan	98.5 %	54,648,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					<b>213,149,000</b>					
2	12	4	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>					<b>154,901,000</b>					
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan		100 %	6 Dokumen	48 %	154,901,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	12	4	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					<b>58,248,000</b>					
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan		100 %	1 Laporan	48 %	58,248,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>TOTAL</b>												<b>18,034,314,432</b>			



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2021 –2026. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 mencakup 22 Sub Kegiatan, 11 Kegiatan dalam 4 Program untuk mencapai 1 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kerja Tahun 2023 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Melalui Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

#### ➤ **Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2023 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023;

2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023;

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026. Pada akhir tahun anggaran 2022 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Batam, 22 Juli 2022

**KERALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**



**HERYANTO, S.E.**  
NIP. 19641107 199203 1 015

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	12																
2	12	01															
2	12	01	2.02														
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	76 Orang/bulan	100%	12.519.505.672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12.092.094.630
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	24 Dokumen	100 %	47.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29.180.000
2	12	01	2.05														
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Paket	100 %	110.385.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Orang	100 %	151.506.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
2	12	01	2.06														
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	7.033.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.625.000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	6 Paket	100 %	160.113.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.892.931.485
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	7.876.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17.952.000

2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3 Paket	100 %	27.588.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	134.302.200
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	30 Laporan	100 %	280.136.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	302.354.000
<b>2 12 01 2,07</b>													<b>549.552.400</b>			<b>569.580.000</b>		
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	85 Unit	100 %	549.552.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	569.580.000
<b>2 12 01 2,08</b>													<b>1.538.047.360</b>			<b>1.561.413.982</b>		
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	47.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	176.250.000
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	416.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	426.013.342
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	23 Laporan	100 %	1.074.397.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	959.150.640
<b>2 12 01 2,09</b>													<b>437.474.000</b>			<b>386.809.660</b>		
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	39.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42.613.316
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5 Unit	100 %	174.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	153.078.002

2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92 Unit	100 %	71.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	73.925.214		
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2 Unit	100 %	151.874.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	117.193.128		
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>							<b>1.747.246.000</b>				<b>569.580.000</b>		
2	12	02	2,01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>							<b>1.692.598.000</b>				<b>491.910.000</b>		
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	12 Dokumen	87 %	116.616.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	129.450.000		
					<b>Pekerjaan Belanja ATK dan Cetak Formulir Pendaftaran Kependudukan</b>								12 Dokumen		100.804.000			
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	120.000 Dokumen	87%	1.575.982.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	362.460.000		
					<b>Pekerjaan Belanja Ribbon dan Tinta Printer Penvetakan KTP-EI dan Cetak Blanko KIA</b>								120.000 Dokumen		1.498.582			
2	12	02	2,03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>							<b>54.648.000</b>				<b>77.670.000</b>		
2	12	02	2,03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	1 Laporan	87 %	54.648.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	77.670.000		
					<b>Pekerjaan Sosialisasi (Belanja Seminar Kit, Spanduk, Konsumsi, Sewa Gedung Pertemuan dan Nara Sumber)</b>								1 Laporan		54.648.000			
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>							<b>237.522.500</b>				<b>440.130.000</b>		
2	12	03	2,01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>							<b>182.874.500</b>				<b>362.460.000</b>		
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	100 %	36.000 Dokumen	98.5 %	182.874.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	100 %	362.460.000		
					<b>Pekerjaan Belanja ATK, Tinta Printer dan Cetak Formulir Pencatatan Sipil</b>								36.000 Dokumen		95.253.500			

